

**STRATEGI TOKOH PEMEKARAN DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**

***STRATEGY OF REGIONAL EXPANSION FIGURES IN THE 2020 REGIONAL EXECUTIVE
ELECTION IN DHARMASRAYA REGENCY***

Agung Patria Ikham¹, Syaiful Wahab², Tamrin Kiram³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
agungfatria01@gmail.com

ABSTRAK: Kelompok pemekaran menjadi kelompok kepentingan yang cukup kuat di Kabupaten Dharmasraya. keberadaan tokoh-tokoh dari kelompok pemekaran yang selalu mendapat tempat pada posisi pemerintahan terkhususnya jabatan bupati ataupun wakil bupati. Eksistensi, indikasi dukungan sesama kelompok pemekaran dan adanya jaringan hubungan antara kelompok pemekaran dan pemerintah daerah. Kelompok pemekaran akan mendapatkan kemudahan dengan adanya jabatan dari adanya tokoh pemekaran didalam pemerintahan. Majunya Dasril Panin sebagai calon yang ditunjuk untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Dharmasraya mendapat dukungan dari Adi Gunawan yang juga bagian dari tokoh pemekaran, serta didasari oleh fakta bahwa keinginan dari kelompok pemekaran untuk menempatkan seorang tokohnya untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati agar tujuan-tujuan kelompoknya dapat menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi tokoh pemekaran daerah sebagai bagian dari kelompok kepentingan dalam menjaga eksistensinya pada pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus instrumental dengan teori kelompok kepentingan Gabriel A. Almond yang terdapat 3 dimensi yang menentukan strategi kelompok kepentingan yakni 1). Mobilisasi dukungan, 2). Mobilisasi energi, 3.) Mobilisasi sumberdaya. Eksistensi dari kelompok pemekaran mulai memudar pada pemerintahan periode ke-3. Turunnya eksistensi tersebut membuat tokoh-tokoh pemekaran mulai berupaya menyandingkan salah satu tokohnya yakni Dasril Panin dengan Sutan Riska yang merupakan petahana pada pemilihan kepala daerah 2020. Pada suatu sisi penyandingan tersebut berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tujuan-tujuan dari kelompok pemekaran lebih diperhitungkan, seperti tiap tokoh pemekaran mendapat posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Tujuan dari kelompok pemekaran saat sekarang ialah berusaha untuk melakukan lobby politik untuk pembangunan patung juang dan kantor sekretariat kelompok pemekaran

Kata kunci: Strategi, Kelompok, Kepentingan, Pemekaran

ABSTRACT: Expansion group is a powerfull interest group in Dharmasraya Regency. Existence of figures from the expansion group always get a place in government positions, especially the positions of regents or deputy regents. Existence, indications of support from other expansion groups and the network of connection between expansion groups with local government, the expansion groups will get benefit from the existence of expansion figures in the government. Nominated Dasril Panin as the candidate to become deputy regent of Dharmasraya was get support from Adi Gunawan who was also part of the expansion figures, as well the fact from expansion group want to figure as a candidate for regent or deputy regent so that the group's goals could become focus in government. The purpose of this study is to analyze the strategy of regional expansion figures as part of interest groups in maintaining their existence in regional government in Dharmasraya Regency in 2020. This research uses a qualitative method of instrumental case study from Gabriel A. Almond's, interest group theory which has 3 dimensions that determine group strategy interests namely 1). Support Mobilization, 2).

Energy Mobilization, 3.) Resources Mobilization. Existence from expansion group began to fade in the 3rd period of government. This descent of these existence make the expansion figures try to the one of their figures for regional executive election. Dasril Panin nominate with Sutan Riska who is an incumbent in the 2020 regional executive elections. On the other hand, this pairing has affective to support expansion group by the government for the goals of the expansion group, as each expansion figure gets important positions in government. The current goals of the expansion group is to try lobbying for the construction of a fighting statue and the secretariat office for the expansion group.

Keywords: Strategy, Group, Interest, Expansion

A. PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri melalui otonomi daerah, menyebabkan terbentuknya daerah-daerah pemekaran. Pemekaran daerah menyebabkan pemilihan kepala daerah juga akan dilaksanakan pada daerah pemekaran. Tujuan memekarkan daerahnya ialah untuk memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.¹Pemekaran daerah dilakukan oleh aktor-aktor politik daerah yang menjadi penggerak utama dalam usaha memisahkan daerah induk dengan daerah yang dimekarkan. Aktor politik penggerak pemekaran berada dalam posisi sebagai birokrat senior daerah maupun pusat, elite etnik, politisi, tokoh LSM dan tokoh adat.² Salah satu contoh pemekaran yang digerakan oleh aktor politik daerah dan pusat ialah di Kabupaten Dharmasraya. Pemekaran terjadi atas dasar gerakan yang dilakukan oleh Hasan Zaini (Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung) dan Dasril Panin (Anggota DPR RI 1993-1996).

Kelompok pemekaran memiliki peran sebagai kelompok penting terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, tentunya peran tersebut dalam konteks politik lokal yang sangat menentukan nasib masyarakat lokal, dukungan masyarakat berperan penting dalam sebuah gerakan perubahan. Dukungan dari berbagai elemen juga merupakan kekuatan politik yang kuat, sebab tak hanya dari aktor politik saja yang menginginkan pemekaran, sehingga awal terbentuknya keinginan untuk memekarkan diri merupakan cerminan dari menguatnya peranan kekuatan-kekuatan politik. Kabupaten Dharmasraya dibentuk dari pemekaran dengan Sawahlunto/Sijunjung berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten baru secara resmi pertama kali memiliki bupati yang sah melalui pemilihan bupati dan wakil bupati pada 12 Agustus 2005, bupati dan wakil yang pernah menjabat masih tergolong sedikit, sampai saat ini baru memasuki periode ke-empat kepemimpinan serta 3 dari 4 periode kepemimpinan daerah tersebut diisi oleh keberadaan tokoh pemekaran didalamnya baik itu posisi sebagai bupati maupun wakil bupati.. Kabupaten Dharmasraya pada pemerintahan periode pertama, ke-dua dan ke-empat, posisi pemerintahan diisi oleh kepemimpinan calon yang berasal dari tokoh pemekaran Kabupaten Dharmasraya yakni: Marlon dengan Tugimin pada (2005-2010 pemerintahan periode pertama), Adi Gunawan dengan Syafrudin R (2010-2015, Pemerintahan periode ke -2), dan Sutan Riska dengan Dasril Panin Datuak Labuan (2021-2026, Pemerintahan periode ke-4).

Pemekaran daerah yang dilakukan oleh aktor-aktor politik pada suatu daerah didasari oleh kepentingan-kepentingan dari kelompok mereka, dalam hal ini ialah kelompok pemekaran. Kelompok kepentingan merupakan setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pada waktu yang sama tidak berusaha memperoleh jabatan publik.³ Masyarakat perlu adanya kontrol kelompok atas perilaku elit, perlu adanya orang-orang didalam kelompok agar menjadi suatu faktor yang mendukung masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan menjadi suatu hal yang kuat untuk jalannya keputusan politik.⁴ Kelompok pemekaran termasuk kedalam kelompok kepentingan Nonasosiasi berdasarkan status yang dilatarbelakangi oleh tokoh-tokoh pemekaran. Adanya jaringan kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya sebagai kelompok kepentingan, terlihat pada struktur pemerintahan yang juga pernah diisi oleh beberapa dari kelompok pemekaran Dharmasraya. Eksistensi yang didapatkan sejalan dengan adanya strategi yang dilakukan sebagai suatu kelompok kepentingan. Gabriel A. Almond mengatakan bahwa terdapat 3 dimensi yang menentukan strategi kelompok kepentingan yakni 1). Mobilisasi dukungan, 2). Mobilisasi energi, 3.) Mobilisasi sumberdaya.

Keberadaan tokoh pemekaran didalam pemerintah daerah memungkinkan mudahnya kelompok pemekaran mempengaruhi proses kebijakan daerah. Peran tokoh pemekaran dalam pemerintahan juga mencapai titik eksistensinya pada pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Diundangnya tokoh pemekaran pada hari ulang tahun Kabupaten Dharmasraya ke-18 pada tahun 2022 yang juga digelarnya rapat sidang paripurna yang dihadiri tokoh-tokoh penting yakni, Mahyeldi (Gubernur Sumatera barat), Bupati Dharmasraya dan wakilnya, ketua DPRD Dharmasraya, Kabupaten tetangga, ninik mamak dan bundo kandung, serta tokoh pemekaran Dharmasraya⁵. Memperlihatkan adanya eksistensi dari kelompok pemekaran sebagai kelompok penting pada pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Keberadaan kelompok pemekaran sebagai suatu kelompok kepentingan cukup eksis dalam hal mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuatan dari kelompok kepentingan berasal dari tiap tokoh-tokoh yang ada didalamnya. Jaringan yang dimiliki kelompok kepentingan menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepala pemerintah.⁶ Kelompok kepentingan tidak hanya tentang kepentingan pribadi privat kelompoknya saja, akan tetapi kepentingan publik juga akan diangkat menjadi kepentingannya apabila sejalan dengan tujuan dari kelompoknya. Kepentingan individu didalam kelompok juga menjadi bagian dari dalam kelompok kepentingan. Individu yang berada didalam struktur pemerintahan menjadi kekuatan dari kelompok kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari dalam pemerintahan.

Fakta dari eksistensinya tokoh pemekaran dalam pemerintahan Dharmasraya dan adanya fakta bahwa 3 dari 4 periode pemerintahan Kabupaten Dharmasraya diisi oleh keberadaan tokoh pemekaran sehingga peneliti berasumsi bahwa strategi kelompok pemekaran pada pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh adanya eksistensi, indikasi dukungan sesama kelompok pemekaran dan adanya jaringan hubungan antara kelompok pemekaran dan pemerintah daerah. Sehingga keberadaan kelompok pemekaran akan mendapatkan kemudahan dengan adanya jabatan dari adanya tokoh pemekaran didalam pemerintahan oleh sebab itu dirumuskanlah pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah strategi dari tokoh pemekaran sebagai bagian dari kelompok kepentingan dalam menjaga eksistensinya pada pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan deskriptif. studi kasus deskriptif adalah pendekatan yang melihat dari instrumental suatu peristiwa dan memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang berada didalam situasi tertentu untuk menguraikannya secara detail serta merupakan kegiatan yang dilakukan secara mendalam tentang peristiwa yang diteliti. Metode ini akan membantu peneliti dalam memahami secara mendalam mengenai strategi tokoh pemekaran daerah pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mobilisasi Dukungan

Mobilisasi dukungan ialah bagian yang membahas dukungan terhadap suatu kelompok kepentingan, dukungan dari kelompok kepentingan itu sendiri bisa berasal dari dukungan pemerintah atau diluar pemerintah. Mobilisasi dukungan mengerahkan kelompok kepentingan haarus mampu mencapai atau berhubungan langsung dengan para pembuat keputusan politik utama. Hubungan antara tokoh pemekaran yang berada didalam pemerintahan daerah baik itu eksekutif maupun legislatif dengan tokoh pemekaran yang berada diluarnya menjadi kekuatan politik dari kelompok pemekaran yang saling mendukung. Jika dilihat dari yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa dukungan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan adanya kepedulian terhadap kelompok pemekaran. Kelompok pemekaran mendapat cukup ruang lebar untuk memberikan masukan terhadap pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Pengaruh memekarkan Kabupaten Dharmasraya dan pengalaman pada pemerintahan sebelumnya menempatkan posisi kelompok pemekaran cukup dihargai oleh pemerintah daerah saat sekarang ini.

Keberadaan tokoh pemekaran pada pemerintahan Kabupaten Dharmasraya menjadi perhatian pemerintah daerah terlebih lagi dari segi mempengaruhi kebijakan. Kekuatan yang cukup kuat dimiliki karena beberapa dari tokoh pemekaran berada dalam posisi pemerintahan, seperti DPRD, Wali Nagari, Wakil Bupati, serta adanya tren kemunculan tokoh pemekaran dalam pemilihan kepala daerah. Eksistensi dari kelompok pemekaran juga terlihat karena masih mendatangi panggilan-panggilan acara penting di Kabupaten Dharmasraya. Eksistensi dari kelompok pemekaran diawali karena tujuan memekarkan Kabupaten Dharmasraya menyebabkan masyarakat banyak mengetahui tokoh-tokoh pemekaran. Kelompok pemekaran ini diisi oleh tokoh-tokoh yang penting sebelum dimekarkannya Kabupaten Dharmasraya seperti, anggota dewan DPR RI, DPRD, Pejabat bupati, pengusaha. Mereka me bentuk kelompok atas dasar pemerintahan daerah. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap tokoh pemekaran juga berkaitan dengan partisipasi kelompok pemekaran dalam agenda pembuatan peraturan daerah. Serta dukungan semakin kuat disebabkan oleh adanya eksistensi dari tokoh pemekaran pada tiap kecamatan sebagai tokoh penting masyarakat yang mengatur masyarakat di masing-masing kecamatan, seperti Adi Gunawan dan Kapidis Rasyid (Kecamatan Sitiung), Hendri dan Hasan Zaini (Kecamatan Koto Baru), Abdul Harris (Kecamatan Pulau Punjung)

2. Mobilisasi Energi

Mobilisasi energi ialah maksud dan tujuan dari kelompok kepentingan dapat dipahami dan diterima dengan jelas. Mobilisasi energi akan mengarahkan kepada arah dari kehadiran suatu

kelompok. Mobilisasi energi berusaha untuk memaksimalkan aspek konsen kelompok sebagai kelompok kepentingan, sehingga kemampuan melakukan kerja (energi) itu sendiri dapat sesuai dengan konsennya. Tujuan dari kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya ialah untuk tetap eksis pada pemerintahan Dharmasraya hal ini terbukti dari berbagai strategi dan upaya dari kelompok pemekaran kabupaten Dharmasraya agar tokoh-tokohnya ikut andil dalam pemerintahan seperti, tujuan yang di upayakan oleh kelompok pemekaran untuk menyangdingkan Adi Gunawan dengan Sutan Riska pada pemerintahan periode ke-3 yang agar mendapatkan suara yang kuat di pemerintahan Dharmasraya dan penyandingan tersebut mengalami kegagalan. Pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan ucapan Abdul Harris (tokoh pemekaran Kabupaten Dharmasraya) tentang upaya dari tokoh-tokoh pemekaran untuk menyangdingkan Sutan Riska dengan Dasril Panin yang merupakan tokoh pemekaran.

Gagalnya upaya pada pemilihan kepala daerah periode ke-3 membuat kelompok pemekaran pada pemilihan kepala daerah 2020 menyangdingkan Sutan Riska dengan Dasril Panin. Usaha tersebut yang memperlihatkan bahwa adanya gerakan dari kelompok pemekaran untuk memperkuat eksistensinya sebagai kelompok kepentingan di Kabupaten Dharmasraya sehingga kelompok pemekaran memanfaatkan keberhasilan dari penyandingan tersebut untuk melakukan lobi politik kepada pemerintah yang juga bagian dari tokoh mereka. Tujuan lainnya dari kelompok pemekaran ialah dibuatkannya buku yang bercerita tentang pemekaran dan tokoh-tokohnya serta pembuatan patung juang kelompok pemekaran Kabupaten Dharmasraya dan pembuatan kantor sekretariat untuk kelompok pemekaran. Tujuan kelompok pemekaran terdapat beberapa yang telah terealisasi seperti pembuatan buku, dan tujuan lainnya masih dalam tahap lobi politik.

3. Mobilisasi Sumberdaya

Mobilisasi sumber daya secara mendasar berusaha mengetahui bagaimana sebuah kelompok mengupayakan sumber daya yang mereka miliki untuk bisa melakukan suatu perubahan sosial dan tercapainya tujuan kelompok. Almond mengatakan bahwa terdapat faktor yang menentukan efektivitas kelompok kepentingan ialah seberapa luas sumberdaya yang dimiliki kelompoknya, seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi dan prestisenya dimata masyarakat. Sumberdaya digunakan dan diarahkan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan-dukkungan tersebut akan memperkuat posisi kepentingan dari kelompoknya.

Kelompok pemekaran memiliki sumberdaya anggota dan kecakapan politik yang kuat didalam pemerintahan kabupaten Dharmasraya. Keberadaan tokoh pemekaran di setiap posisi pemerintahan menjadikannya memiliki peluang dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Pada pemerintahan tahun 2020 terdapat beberapa tokoh yang mengisi pemerintahan, seperti Wakil Bupati, Wali Nagari Sungai Rumbai, Wakil DPRD, Camat Koto Baru, ketua LKAAM Kabupaten Dharmasraya. Tokoh-tokoh dari kelompok pemekaran yang berada pada pemerintahan Dharmasraya menjadi suatu sumberdaya yang dimiliki kelompok pemekaran. Tokoh pemekaran yang berada pada posisi-posisi penting pemerintahan dimanfaatkan oleh kelompok pemekaran sebagai strategi yang dapat membuat eksistensi dari kelompok pemekaran pada pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya dapat terlihat. Keberadaan tokoh pemekaran dalam pemerintahan juga membuat adanya posisi aman bagi kelompok pemekaran. keberadaan tokoh pemekaran dalam posisi posisi pemerintahan akan mempermudah kelompok pemekaran dalam penyampaian kepentingannya atau kepentingan publik kepada pemerintah. Kelompok pemekaran juga menjadi salah satu isu tentang

kelompok kepentingan yang dekat dengan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya sehingga persaingan antar kelompok kepentingan terminimalisir.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwasanya strategi dari kelompok pemekaran memperlihatkan adanya upaya dari kelompok pemekaran sebagai kelompok kepentingan untuk penyandingan Sutan Riska dengan Dasril Panin. Untuk memperkuat eksistensinya sebagai kelompok kepentingan di Kabupaten Dharmasraya sehingga kelompok pemekaran memanfaatkan keberhasilan dari penyandingan tersebut untuk melakukan lobby politik kepada pemerintah sebagai usaha mereka dalam posisi kelompok kepentingan. Penyandingan seorang tokoh pemekaran dalam pemilihan kepala daerah didasari oleh kepentingan kelompok mereka agar tujuan-tujuan mereka sebagai kelompok kepentingan dapat lebih diperhatikan dan membuat mereka mendapatkan eksistensi pada pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Kelompok pemekaran merupakan kelompok kepentingan yang berusaha agar mendapatkan eksistensi serta kepentingan kelompoknya yang diupayakan dengan menempatkan mobilisasi dukungan, mobilisasi sumberdaya dan mobilisasi energi.

Kelompok pemekaran bergerak dengan memanfaatkan kekuatan dari tiap tokoh-tokohnya yang juga merupakan tokoh-tokoh penting di Kabupaten Dharmasraya. Strategi dari tokoh tokoh pemekaran pada pemerintahan daerah 2020 menjelaskan bahwa tokoh pemekaran mendapatkan dukungan dari pemerintah disebabkan karena tokoh-tokohnya mengisi jabatan politik dan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Dukungan pemerintah terhadap kelompok pemekaran ialah dengan membentuk partisipasi tokoh pemekaran dalam pembuatan peraturan daerah yang selalu diundang oleh DPRD kabupaten Dharmasraya dan dukungan dari masyarakat yang didapatkan kelompok pemekaran disebabkan peran yang mereka lakukan sebagai pengatur tokoh-tokoh masyarakat lainnya di tiap Kecamatan, peran tersebut memperkuat posisi mereka sebagai kelompok kepentingan dalam memperkuat eksistensinya.

Mobilisasi energi yang menempatkan tujuan dari kelompok pemekaran. tujuan dari tiap tokoh-tokohnya. Mendapatkan jabatan didalam pemerintahan, memperkuat jabatan, tujuan kelompok berupa kebijakan menguntungkannya. Tokoh pemekaran Kabupaten Dharmasraya menggunakan posisi ketokohnya sebagai tokoh pemekaran untuk mendapatkan jabatan publik dan mempermudah untuk dicalonkan dari partai politik. Pada sisi lain keberadaan tokoh pemekaran menguntungkan posisi tokoh-tokoh yang diluar pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan. Fakta bahwa 3 dari 4 periode keberadaan tokoh pemekaran dalam jabatan pemerintahan mempengaruhi bagaimana gerak kelompok pemekaran. Strategi dari tokoh pemekaran sebagai kelompok kepentingan terlihat pada saat upaya menyandingkan Dasril panin yang merupakan tokoh pemekaran dengan Sutan riska sebagai calon yang akan maju pada pemilihan 2020. Terpilihnya Sutan Riska dan Dasril Panin sebagai bupati dan wakil bupati membuat tokoh pemekaran bergerak pada tujuan baru yakni upaya pembangunan patung juang dan kantor sekretariat untuk kelompok pemekaran. Pergerakan tujuan dari kelompok pemekaran memperlihatkan bahwa mereka memiliki energi dari keberadaan tokoh-tokohnya.

Energi kelompok pemekaran terbentuk karena keberadaan tokoh tokohnya, sehingga tokoh pemekaran bisa memanfaatkan sumberdaya anggota yang mereka miliki. Kelompok pemekaran memiliki sumberdaya yakni anggota atau tokoh-tokoh mereka dalam pemerintahan daerah. Dasril Panil sebagai tokoh pemekaran yang dipilih sebagai calon wakil dari Sutan Riska ialah saran dari Abdul Harris yang juga tokoh pemekaran, Adi Gunawan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya, dan posisi pemerintahan lainnya seperti Abdul Harris yang berada pada LKAAM, Hendri pada Camat Koto Baru, serta posisi tokoh pemekaran dalam tiap kecamatan menjadi tokoh penting bagi masyarakat. Kelompok pemekaran tidak tidak begitu kuat dari segi mobilisasi sumberdaya yang mereka miliki hal ini disebabkan kelompok pemekaran hanya terfokus pada pemberian pengaruh dari tokoh-tokohnya yang

merupakan anggota dari kelompoknya. Strategi dari kelompok pemekaran didasari oleh peran mereka saat sekarang dalam pemerintahan yakni peran kebijakan publik yang di sampaikan oleh kelompoknya kepada pemerintahan, sebagai pengatur tokoh-tokoh masyarakat lainnya di tiap kecamatan, sebagai pemantau pemerintahan daerah serta sebagai perumus kepentingan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Almond. Gabriel dan G. Bringham Powell, Jr. 1966. *Comparative politics: a developmental approach*. Canada. Little Brown and Company.
- Agustino, Leo dan Agus, Muhammad Yusoff. 2010. Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongman dan Roving Bandits. *Journal of Histpry, Politics & strategic Studies*. Volume 37. 86-104.
- Maiwan. Muhammad, 2016. Kelompok kepentingan (Interest group), kekuasaan dan kedudukannya dalam sistem politik. *J Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 15 (2).75-91
- Mukhlisin, Syamsul. 2021. Mobilisasi politik kelompok kepentingan dalam pilpres 2014 di desa dasan borok (Studi Nadhlatul Wathan). *J POPULIKA*. 9 (2). 60-69
- Nova anggraini. (8 januari 2022). HUT Kabupaten Dharmasraya ke-18, DPRD gelar sidang paripurna. Diakses pada pukul 13.30 WIB Kamis 21 Juli 2022. www.harianhaluan.com/news/. Diakses pada 21 Juli 2020 pukul 14.40
- Peraturan pemerintah no 129 tahun 2000 Tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.